

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisiuss, 1990.

Agussalim Andi Gadjong,, *Analisis Filosofis Pemerintah Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum Negara*, artikel dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41 No.1 Januari 2011.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1982.

A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*, Jakarta: Djembatan, 2004.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka otonomi daerah*, Makalah pada seminar nasional, Bandung : Fakultas Hukum Unpad, 13 mei 2000.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2003.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014.
- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan, cetakan 10*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widiastuti, *Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta*, artikel dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*. 2013.
- Erri N. Megantara, *Pendekatan Pembangunan Antroposentris VS Ekosentris*, Bandung: Yayasan Pribumi Alam Lestari, 2000.
- Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Heinrich Triepel, *dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi*, Jakarta: PPS Fisip UI, 2002.

- Hilipus M. Hadjon, *tentang wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*.
- I GdePantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: alumni, 2013.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Jerzy Kozlowski: penerjemah, Bambang Purbowaseso, *Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota Wilayah dan Lingkungan teori dan praktek*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Surabaya : Bayu media, 2005.
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Adminstrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1985.
- Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,
Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2003.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:
Erlangga, 2004.
- Nono Sampono, dkk, *Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Kegiatan
Penangkapan Ikan Di Teluk Jakarta*, Bogor: Jurnal Tidak Diterbitkan,
2012.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*,
Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:
PT.Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)
Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998*.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas
Hukum Unair, 1998.
- Prajudi Admosudirjo, *Teori kewenangan*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2001.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1981.
- R.M. Gatot P, Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar
Grafik, 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2013.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, untuk Kesejahteraan Rakyat Kumpulan pemikiran Rokhmin Dahur*, Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia, 2000.
- Ruchyat Deni Djakapermana, *Penataan Ruang, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, 2011.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Rusadi Kanta prawira, *Hukum dan Kekuasaan Makalah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :U-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2008.

Syahda Guruh Langkah Samudra, *Menimbang Otonomi vs Federal, Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962.

Syamsir Salam Amir Fadilah, *Sosiologi Pendesaan*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 kemudian telah diganti dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

C. PRANALAR LUAR

Jonggi Manihuruk, Reklamasi final secara hukum, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/71176/reklamasi-final-secara-hukum/2016-10-10#>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pada pukul 20.31.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/newsanalysis/pfpd65440/akhirnya-anies-cabut-izin-seluruh-pulau-reklamasi>, di akses pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 11.31 WIB.

Sri Handayani, Farah Noersativa, Akhirnya Anies Cabut Izin Seluruh Pulau Reklamasi,2018.<https://www.republika.co.id/berita/nasional/newsana>

lysis/18/09/27/pfpd65440-akhirnya-anies-cabut-izin-seluruh-reklamasi, di akses pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 16.15 Wib.

Rita Ayuningtyas, <http://m.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-jakarta>, diakses pada tanggal 25 April 2019 pada pukul 21.24 WIB.

Valentino, [http://www.dobrak.net/2016/04/sejarah-kronologi-reklamasi-teluk jakarta.html?m=1](http://www.dobrak.net/2016/04/sejarah-kronologi-reklamasi-teluk-jakarta.html?m=1), Sejarah Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pada pukul 01.10 WIB

